

Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

JURNAL JURISTIC :
Vol. 2 No. 2
(2022) : OKTOBER

Sosialisasi Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Karo

Rian Mangapul Sirait[1)] Irma Novi Ade Kristiani Zebua [2)]
Program Hukum Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi Indonesia, Indonesia
*E-mail:----

Abstrak

Menjadi tua di Indonesia merupakan tahapan kehidupan yang berisiko. Seiring menurunnya kemampuan kerja penduduk lanjut usia akibat usia tua ataupun disabilitas, mereka semakin rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat lansia. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan terhadap lansia sangat memadai. Penyuluhan ini juga mendorong masyarakat menjadi lebih kritis dalam menilai calon legislatif dan meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan pemahaman hukum. kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong terciptanya pemilu yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: perlindungan, sosial, lanjut usia

Abstract

Aging in Indonesia is a risky stage of life. As the work capacity of the elderly population decreases due to old age or disability, they are increasingly vulnerable to falling into poverty compared to younger people. This study aims to provide protection for the elderly community. The method used is a participatory legal counseling method with a descriptive qualitative approach. The results of the counseling show that the level of public understanding of protection for the elderly is very adequate. This counseling also encourages the community to be more critical in assessing legislative candidates and increasing the participation of community leaders in disseminating legal understanding. This activity has proven effective in building public legal awareness. Therefore, legal counseling needs to be carried out continuously to encourage the creation of clean and integrity-based elections.

Keywords: *protection, social, elderly*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menjadi tua di Indonesia merupakan tahapan kehidupan yang berisiko. Seiring menurunnya kemampuan kerja penduduk lanjut usia (lansia) akibat usia tua ataupun disabilitas, mereka semakin rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, banyak penduduk lansia, khususnya perempuan lansia, harus bergantung pada anggota keluarganya yang sebenarnya juga harus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, penduduk lansia di Indonesia kebanyakan berkeinginan untuk mempertahankan kemandirian mereka sekaligus martabat mereka selama mungkin.

Kesulitan yang mereka hadapi terutama berakar dari terbatasnya perlindungan sosial bagi penduduk lansia. Sekitar 85 persen lansia di Indonesia tidak memiliki jaminan ekonomi/pendapatan. Jika ada suatu skema bantuan sosial yang bisa diberikan secara rutin (misalnya setiap bulan) kepada seluruh masyarakat Indonesia ketika mereka mencapai usia 65 atau 70, maka hal itu akan secara drastis mengurangi kemiskinan dan ketidakamanan secara ekonomi pada usia lanjut.

Di saat yang sama, hal ini juga akan meningkatkan kohesi sosial dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Bantuan ini akan menjadi pelengkap pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pensiun kontribusi yang dibayarkan melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan cakupan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia begitu mereka mencapai usia tertentu.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu bagaimana tindakan Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia di Karo.

3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas kepedulian terhadap sesama sebagai upaya pembangunan masyarakat di tanah karo

2) Tujuan Khusus

a. Menumbuhkan empati kepada masyarakat di tanah karo dalam menciptakan ketentraman

b. Memberdayakan kebaikan untuk lingkungan dimana masyarakat ditanah karo tinggal
c. Menggerakan kebaikan dari jauh dalam bentuk memberdayakan jangkau dan berstandar global kepada masyarakat ditanah karo.
d. Beradaptasi dalam aksi kemanusiaan disekitas masyarakat ditanah karo.

4. Manfaat Penelitian

Mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum di dalam masyarakat melalui pendekatan terhadap perilaku masyarakat dalam menerima dan memahami norma hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian terhadap Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang orang, dengan studi lapangan mengenai bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi hukum (aspek sosiologis).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Karo, Sumatera Utara, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan bagi penduduk lansia (60 tahun ke atas), berupa sistem perlindungan sosial bagi kelompok lansia yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan pendapatan/ekonomi untuk individu ketika mereka berusia 65 tahun ke atas

1. Penduduk lansia akan bertambah banyak dan sebagian besar masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhannya serta menjaga martabatnya.

Sekitar 6 persen penduduk Indonesia akan berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2020 (lihat Gambar 1). Angka ini akan meningkat sebesar 8 persen pada tahun 2030 dan 14 persen pada tahun 2050 (UN DESA, 2017). Jumlah penduduk usia produktif hari ini akan menjadi penduduk lansia di masa depan, dan kita harus memastikan bahwa penduduk lansia di Indonesia memperoleh perlindungan sosial yang memadai di usia tua mereka. Penduduk berusia di atas 50 tahun saat ini akan menjadi 40 persen pemilih (voting population) pada tahun 2040, sehingga kebutuhan mereka penting untuk diperhatikan.

Angka kemiskinan tertinggi di Indonesia ditemukan terjadi pada penduduk usia 65 tahun ke atas. Sekitar 80 persen penduduk usia 65 tahun tinggal di rumah tangga dengan konsumsi per kapita di bawah Rp 50.000 per hari (kurang dari US$4 per hari). Angka kemiskinan untuk penduduk berusia 80 tahun ke atas bahkan lebih tinggi lagi. Hampir satu dari lima penduduk usia 80 tahun hidup dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dan proporsinya meningkat signifikan jika kita menggunakan pengukuran alternatif, yaitu berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Lebih lanjut, penduduk yang hari ini masih tergolong aman secara sosial ekonomi belum tentu tetap aman di masa depan, karena pendapatan mereka mengalami perubahan dan krisis/bencana kecil saja dapat dengan mudah membuat penduduk lansia menjadi miskin.

Kemampuan penduduk untuk bekerja juga menurun seiring usia, dan tingkat disabilitas meningkat tajam. Setidaknya empat dari setiap 10 penduduk Indonesia berusia 70 tahun ke atas mengalami satu jenis disabilitas yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh

pendapatan secara mandiri (BPS, 2010; Adioetomo, Mont dan Irwanto, 2014). Ini berarti 65 persen penduduk berusia 60 tahun ke atas bergantung pada anak-anak mereka yang telah dewasa untuk membiayai kebutuhan mereka.

Lebih lanjut, menjadi lansia berarti mereka harus membayar biaya kesehatan yang lebih tinggi, sehingga keluarga yang menanggung biaya penduduk lansia tersebut dapat mengalami kesulitan/ beban keuangan yang signifikan. Sebagai akibatnya, kemampuan keluarga ini berinvestasi untuk anak-anak mereka sendiri menjadi berkurang, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kapasitas angkatan kerja bangsa ini di masa depan. Penduduk lansia di Indonesia menganggap penting sekali untuk mampu membantu orang lain, dan hal ini berarti jika mereka terpaksa harus mengandalkan anggota keluarga lainnya yang masing produktif, mereka akan merasa kehilangan harga dirinya (Kreager and Schroder-Butterfill, 2008, 2010, 2015).

Kelompok lanjut usia memiliki dimensi gender yang kuat. Di Indonesia 53 persen penduduk usia 65 tahun ke atas adalah perempuan, karena perempuan cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki. Lansia perempuan pada kelompok usia 60-80 tahun menghadapi kerentanan yang spesifik dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya:

- Lansia perempuan 14 persen lebih berisiko mengalami kemiskinan;
- Lansia perempuan berisiko lebih tinggi untuk menjadi janda (56 persen perempuan dibandingkan dengan 15 persen laki-laki);
- Lansia perempuan berisiko lebih tinggi untuk hidup sendiri (15 persen perempuan dibandingkan dengan 5 persen laki-laki).
- Lansia perempuan cenderung berpeluang lebih rendah untuk berpartisipasi di lapangan kerja, dan berisiko lebih tinggi untuk bergantung pada keluarga mereka untuk menanggung hidup mereka (76 persen perempuan dibandingkan dengan 56 persen laki-laki) (Susenas, 2017).

2. **Pemerintah dapat memperkuat sistem perlindungan sosial yang saat ini ada untuk lebih memperhatikan penduduk usia lanjut.**

Sekitar 85 persen penduduk lansia di Indonesia tidak memiliki jaminan pendapatan. Sistem perlindungan sosial yang ada saat ini lebih banyak menjangkau anggota masyarakat yang lebih mampu di sektor formal misalnya melalui asuransi sosial dengan kontribusi/ iuran dan pensiun PNS. Sistem perlindungan sosial saat ini juga menyasar kelompok miskin melalui program bantuan sosial. Namun, mayoritas penduduk berpenghasilan menengah - yaitu 'kelompok menengah baru yang belum terjangkau'/'missing middle' - hidup dengan pendapatan rendah dan rentan terhadap risiko dan goncangan sehari-hari. Karenanya, kelompok "missing middle" ini memerlukan akses yang lebih baik kepada perlindungan sosial.

3. Bantuan sosial untuk penduduk lanjut usia adalah instrumen perlindungan sosial yang paling umum dan terbesar yang digunakan di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah.

Skema bantuan sosial ini menjadi landasan bagi sistem perlindungan sosial bagi lansia yang lebih luas, yang menjamin adanya pendapatan minimal yang memadai bagi seluruh penduduk pada usia tertentu.

Kebanyakan negara telah menerapkan bantuan sosial bagi lansia ketika negara tersebut masih lebih miskin dari Indonesia (lihat Gambar 5). Nepal menunjukkan bahwa dengan kondisi negara yang kurang mampu tidak menjadi halangan untuk menyediakan bantuan sosial lansia. Sebagai salah satu negara termiskin di Asia, Nepal telah mengalokasikan sekitar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP)-nya untuk memberikan bantuan kepada lansia, yang mencakup semua penduduk berusia 65 tahun ke atas dan semua perempuan yang hidup sendiri berusia di atas 60. Seiring cepatnya peningkatan jumlah penduduk yang menua di seluruh Asia, pemerintah di negara-negara tersebut membentuk suatu sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk lansia, khususnya karena hal ini sekarang telah menjadi isu kebijakan yang penting (TNP2K-MAHKOTA, 2018).

4. Indonesia sebenarnya mampu memberikan bantuan yang layak bagi seluruh penduduk lanjut usianya yang akan menghapuskan kemiskinan pada masa tua.

Negara-negara berpendapatan menengah lainnya telah mengalokasikan

sekitar 14,6 persen dari PDB per kapitanya (HelpAge International, 2015). Bantuan sosial bagi seluruh penduduk lansia yang bernilai Rp600.000 per bulan - sekitar 12,9 persen PDB per kapita - akan menurunkan tingkat kemiskinan pada lansia secara drastis di kalangan lansia dari 15 persen menjadi 1,2 persen.

Skema ini juga akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan 'kelompok menengah baru yang belum terjangkau' ('missing middle') serta meningkatkan konsumsi rumah tangga per kapita antara 25 hingga 60 persen. Bahkan meskipun dalam besaran yang lebih rendah, yaitu Rp300.000 untuk semua penduduk berusia 70 tahun ke atas, skema bantuan ini tetap akan menurunkan angka kemiskinan pada kelompok usia tersebut dari 16,3 persen menjadi 3,8 persen untuk kelompok usia ini, meskipun manfaat yang akan diterima oleh kelompok 'missing middle' akan relatif rendah (lihat Gambar 6).

Skema bantuan sosial lansia yang berdampak cukup signifikan telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh, sejak 2012, semua penduduk berusia 70 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Jaya telah menerima bantuan lansia sebesar Rp200.000 per bulan, dengan hasil yang positif (lihat kotak). Provinsi DKI Jakarta kini tengah memulai bantuan sosial lansia dengan nilai bantuan sebesar Rp600.000 per bulan untuk sebagian kecil penduduk lansia di DKI Jakarta (sekitar 14.000 dari total 100.000 warga lansia yang ada). Dengan terus bertambahnya penduduk lansia terutama di kalangan penduduk termiskin di Indonesia, sebuah sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk penduduk lansia akan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan nasional secara signifikan (Susenas, 2017).

Sebagai contoh, simulasi dampak pemberian bantuan sosial lansia senilai Rp600.000 per bulan untuk penduduk usia 65 tahun ke atas akan dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan nasional menjadi 8,8 persen. Bahkan jika bantuan sosial lansia tersebut hanya diberikan sebesar Rp300.000 per bulan pun, angka kemiskinan nasional akan tetap menurun ke tingkat 9,4 persen.

Dampak Positif Pemberian Bntuan untuk penduduk lansia

Berbagai dampak positif pemberian bantuan sosial lansia yang dapat terjadi di Indonesia antara lain:

- Keluarga yang bekerja dapat berinvestasi lebih banyak untuk anak-anak mereka, sehingga akan menghasilkan angkatan kerja masa depan yang lebih produktif;
- Penduduk lanjut usia akan turut berkontribusi pada investasi ini dengan mendukung cucu-cucu mereka (karena mayoritas lansia yang menerima bantuan sosial akan memberikan sebagian banutan sosial yang mereka terima kepada anak atau cucu mereka);
- Penyaluran bantuan tersebut akan memicu belanja, dan menciptakan pasar bagi para wirausahawan di tingkat lokal, sehingga akan membentuk lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi;
- Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar ini akan meningkatkan pendapatan pajak, yang pada akhirnya akan dapat membiayai ialokasi anggaran untuk perlindungan sosial di masa depan, dan menciptakan lingkaran positif yang memastikan terlaksananya suatu sistem perlindungan sosial bagi penduduk lansia yang sesuai bagi negara berpendapatan menengah;
- Hal yang terpenting adalah, dari perspektif hak asasi manusia, seluruh penduduk Indonesia akan mendapatkan perlindungan yang dapat membantu mereka menjalani hari-hari senja mereka dengan penuh harkat dan martabat.

D. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penyuluhan hukum yang dilakukan diKaro, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak positif sehingga masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam penyaluran informasi tangang perlindungan bagia lanjut usia.
- masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan

- Kendala yang dihadapi seperti kesulitan yaitu sebagain masyarak sulit beradaptasi
- Kegiatan ini telah mencapai tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat untuk peduli terhadap sesama

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum ke depannya, disarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan penyuluhan hukum dalam agenda tetap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, dibutuhkan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar pesan hukum dapat diterima secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu lebih diberdayakan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya pelatihan dan pendanaan.

E. Referensi

UN DESA, *World Population Prospects: The 2017 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs*, (2017).

BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia. Badan Pusat Statistik, (2010).

Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto, Disabilitas dan Lansia di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia, (2014).

Kreager, P., & Schroder-Butterfill, E. Indonesia's Older Persons in the New Millennium. Journal of Population Ageing, (2008).

Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Badan Pusat Statistik, (2017).

HelpAge International (2015). Global AgeWatch Index 2015. HelpAge International.

TNP2K-MAHKOTA (2018). Studi tentang Sistem Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lansia di Asia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.